

ABSTRAK

Persoalan sampah merupakan permasalahan laten yang dihadapi Indonesia. Permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kegiatan pembatasan sosial selama pandemi, yang menyebabkan peningkatan penggunaan jasa layanan daring yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah sampah di Indonesia. Meningkatnya volume sampah mengakibatkan Sebagian besar tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia mengalami *overload*. Salah satu instrumen kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan terkait TPA tersebut adalah *landfill tax*. Adanya *landfill tax* ini akan mampu mencapai tujuan ganda, yaitu menambah penerimaan negara serta mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA, sehingga mengurangi risiko TPA *overload* yang juga mengatasi masalah terkait lingkungan lainnya yang disebabkan oleh TPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan *landfill tax* di negara lain, potensi penerimaan negara khususnya di Provinsi DKI Jakarta, dan desain yang tepat dalam penerapan *landfill tax* di Indonesia, serta tantangan dan hambatannya. Penulisan ini menggunakan data sekunder berupa metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *landfill tax* di negara-negara lain berlangsung efektif baik dari segi penerimaan negara maupun lingkungan. Potensi penerimaan negara dari *landfill tax* untuk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.1 triliun dan Rp889.5 miliar. Tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain perdebatan mengenai definisi retribusi dan pajak, keengganan daerah melepas salah satu sumber penenerimaannya, korupsi yang masih laten Indonesia, serta proses birokrasi penyusunan undang-undang yang berbelit. Desain yang tepat dapat diperoleh setelah pemerintah berhasil menentukan, subjek pajak, peristiwa hukum, objek pajak, serta tarifnya. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengambilan kebijakan terkait penerapan *landfill tax* di masa mendatang.

Kata kunci: TPA, pajak, pajak lingkungan, *landfill tax*

Abstract

The waste problem is a latent problem faced by Indonesia. This problem is exacerbated by the existence of social restrictions activities during the pandemic, which has led to an increase in the use of online services which has contributed to the increase in the amount of waste in Indonesia. The increasing volume of waste has resulted in most of the landfills in Indonesia experiencing overload. One of the policy instruments that can be applied by the government to solve problems related to landfills is the landfill tax. This landfill tax will achieve the dual purpose of increasing state revenue and reducing the amount of waste that is stockpiled in the landfill, thereby reducing the risk of landfill overload which also overcomes other environmental-related problems caused by the landfill. This study aims to determine the mechanism for applying the landfill tax in other countries, the potential for state revenue, especially in DKI Jakarta Province, and the right design for implementing the landfill tax in Indonesia, as well as the challenges and

obstacles. This writing uses secondary data in the form of a literature study method. The results showed that implementing the landfill tax in other countries was effective both in terms of state revenue and the environment. The potential state revenue from landfill tax for DKI Jakarta Province is Rp. 1.1 trillion and Rp. 889.5 billion, respectively. The challenges and obstacles faced include the debate over the definition of levies and taxes, the reluctance of the regions to give up one of their sources of revenue, the corruption that is still latent in Indonesia, and the complicated bureaucratic process of drafting laws. The right design can be obtained after the government has succeeded in determining the tax subject, legal event, tax object, and rate. The results of this study can contribute ideas for policy-making related to the implementation of the landfill tax in the future.

Keywords: landfill, tax, environmental tax, landfill tax